

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Kondisi Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi terkecil kedua setelah Provinsi DKI Jakarta dan terletak ditengah Pulau Jawa, dikelilingi oleh Provinsi Jawa Tengah dan termasuk zona tengah bagian selatan dari formasi geologi Pulau Jawa.

Disebelah selatan terdapat garis pantai sepanjang 110 km berbatasan dengan Samudera Indonesia, disebelah utara menjulang Gunung Merapi (± 2.968 m), salah satu dari gunung yang paling aktif di dunia. Luas keseluruhan Provinsi DIY adalah 3.185,80 km² atau kurang lebih 0,15% luas daratan Indonesia. Di sebelah barat mengalir Sungai Progo, yang berawal dari Jawa Tengah, dan Sungai Opak disebelah timur yang berawal dari Gunung Merapi yang bermuara di laut selatan.

Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta. Kota-kota lainnya adalah Bantul, Wates, Sleman dan Wonosari. Secara administratif DIY dibagi dalam satu kota dan empat kabupaten, dimana Kota Yogyakarta membentuk kesatuan administrasi sendiri. Jarak ke ibukota negara Jakarta, adalah 600 km kota-kota besar yang paling dekat adalah Semarang di Jawa Tengah (120 km) dan Surabaya di Jawa Timur (320 km) (BPS DIY, 2014).

Provinsi DIY disebelah barat dan tenggara dikelilingi oleh barisan pegunungan disebelah utara oleh Gunung Merapi. Pegunungan dibagian selatan, terutama di Kabupaten Gunung kidul mencapai ketinggian sampai 700 m. Faktor cuaca menyebabkan iklim tropis sepanjang tahun dengan suhu rata-rata, yaitu dari 25°C sampai 32°C, dan di tempat-tempat yang lebih tinggi suhunya lebih dingin, kelembaban udara tergantung pada musim, umumnya berkisar pada 84%. Musim hujan dimulai pada Bulan Oktober dan berakhir pada Bulan Maret. Musim kemarau berlangsung dari Bulan April sampai Bulan September. Jumlah curah hujan dalam jangka waktu satu tahun mencapai 1.750 mm, intensitas tertinggi terjadi pada Bulan Januari sampai Maret, dimana curah hujan perbulan mencapai lebih dari 300 mm setiap m². Selama musim kemarau angin Muson bertiup dari timur dan hujan turun kurang lebih 3 mm setiap m² (BPS DIY, 2014).

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta dibagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan dibagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

1. Kabupaten Klaten disebelah timur laut;
2. Kabupaten Wonogiri disebelah tenggara;
3. Kabupaten Purworejo disebelah barat;
4. Kabupaten Magelang disebelah barat laut.



Sumber: BPS DIY (2015)

Gambar 4.1.

Peta Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Letak Geografis

Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara $7^{\circ}.33'$ - $8^{\circ}.12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}.00'$ - $110^{\circ}.50'$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.890.75 km²), merupakan propinsi terkecil setelah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

- 1) Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,27 km² (18,40 persen);
- 2) Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91 persen);

- 3) Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen);
- 4) Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04 persen);
- 5) Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02 persen).

Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 km² luas Yogyakarta, 35,93 persen merupakan jenis tanah Lithosol, 27,41 persen Regosol, 11,94 persen Lathosol, 10,45 persen Grumusol, 10,30 persen Mediteran, 2,23 persen Alluvial, dan 1,74 persen adalah tanah jenis Rensina.

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian antara 100 m - 499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 63,18 persen, ketinggian kurang dari 100 m sebesar 31,56 persen, ketinggian antara 500 m - 999 m sebesar 4,79 persen dan ketinggian diatas 1000 m sebesar 0,47 persen (BPS DIY, 2014).

3. Iklim

Faktor cuaca menyebabkan iklim tropis sepanjang tahun dengan suhu rata-rata, yaitu dari 25°C sampai 32°C, dan di tempat-tempat yang lebih tinggi suhunya lebih dingin, kelembaban udara tergantung pada musim, umumnya berkisar pada 84%. Musim hujan dimulai pada Bulan Oktober dan berakhir pada Bulan Maret. Musim kemarau berlangsung dari Bulan April sampai Bulan September. Jumlah curah hujan dalam jangka waktu satu tahun mencapai 1.750 mm, intensitas tertinggi terjadi pada Bulan Januari sampai Maret, dimana curah hujan perbulan mencapai lebih dari 300 mm setiap m². Selama musim kemarau

angin Muson bertiup dari timur dan hujan turun kurang lebih 3 mm setiap m² (BPS DIY, 2014).

4. Kependudukan

Berdasarkan hasil Susenas Agustus 2014 jumlah penduduk DIY tahun 2014 tercatat 3.666.533 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,47 persen dan penduduk perempuan 50,53 persen. Menurut hasil proyeksi penduduk kota mencapai 66,74 persen dan penduduk desa mencapai 33,26 persen.

Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 terhadap tahun 2010 mencapai 0,98 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yakni 0,82 persen.

Dengan luas wilayah 3.185,80 km^2 . Kepadatan tertinggi terjadi di kota Yogyakarta yakni 12.322 jiwa per km^2 dengan luas wilayah hanya sekitar satu persen dari luas DIY. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63 persen memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 470 jiwa per km^2 .

Menurut angka proyeksi penduduk 2010-2035, komposisi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun sebesar 8,56 persen.

Kelompok umur 0-24 tahun tercatat 37,80 persen, kelompok umur 25-59 tahun 49,00 persen, dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 13,20

persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tinggi usia harapan hidup penduduk DIY yang mencapai 74.

B. Perkembangan Variabel Penelitian

1. Perkembangan tenaga kerja bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyerapan tenaga kerja berhubungan dengan banyaknya tenaga yang bekerja. Kegiatan bekerja sendiri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 (satu) jam tidak terputus-putus dalam seminggu sebelum hari pencacahan. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi (BPS DIY, 2013).

Tabel 4.1.
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja menurut
Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta
2007-2014 (Jiwa)

Tahun	Kabupaten/Kota						
	Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY	Rata-Rata
2007	201.424	463.964	396.671	505.672	206.514	1.774.245	354.849
2008	210.505	491.765	418.601	537.999	233.335	1.892.205	378.441
2009	212.963	499.319	415.756	530.634	236.976	1.895.648	379.130
2010	211.069	468.822	415.756	531.929	191.139	1.818.715	363.743
2011	203.425	472.076	358.807	561.894	202.393	1.798.595	359.719
2012	218.042	488.773	414.815	544.438	201.640	1.867.708	373.542
2013	228.572	472.808	420.454	568.419	195.818	1.886.071	377.214
2014	236.536	488.734	424.669	590.080	216.024	1.956.043	391.209

Sumber: BPS DIY, 2007-2014

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta pada tahun 2007 hingga

2014 mengalami kenaikan dan penurunan di tahun-tahun berikutnya seperti disalah satu kabupaten yaitu terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2009 jumlah penduduk yang bekerja sebesar 236.976 turun menjadi 191.139 pada tahun 2010 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 202393 penduduk yang bekerja.

Tabel 4.2.
Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2014 (Persen)

Pendidikan	Bekerja			Angkatan Kerja		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
SD ke bawah	35,93	31,85	29,99	35,27	31,22	29,59
SLTP	17,30	17,12	17,78	17,27	16,57	17,54
SLTA Umum	14,78	16,93	16,41	15,27	16,89	16,27
SLTA Kejuruan	17,45	18,52	19,47	17,46	18,45	20,03
Diploma I/II/III	4,58	4,72	4,21	4,72	5,02	4,23
Universitas	9,96	10,86	12,14	10,01	11,85	12,34
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sakernas, BPS DIY

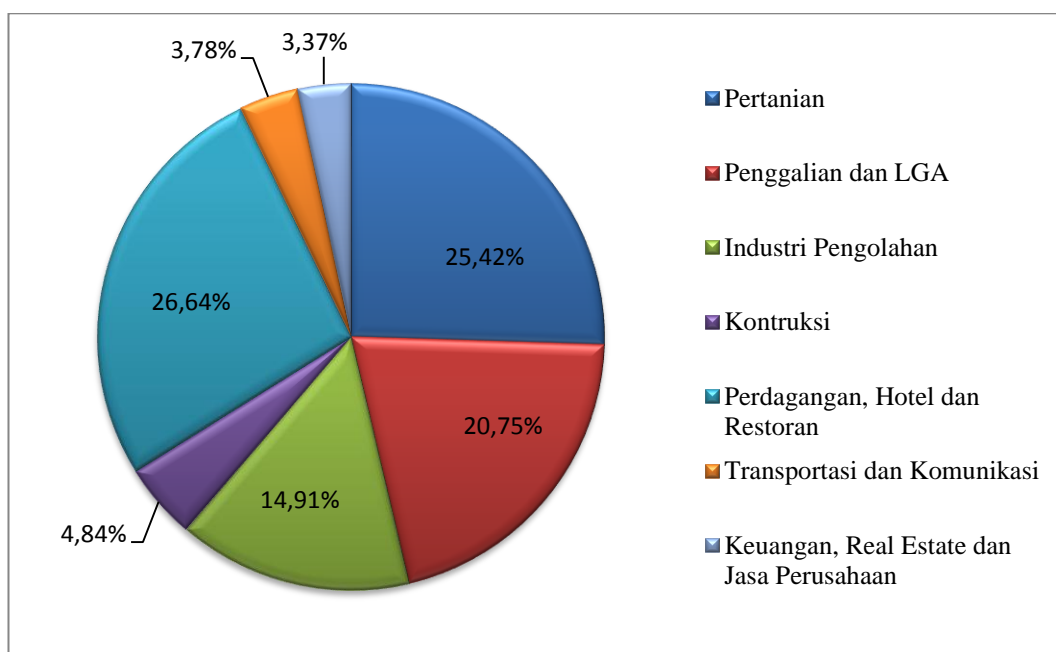
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa struktur angkatan kerja di DIY berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan bahwa mayoritas telah mengenyam pendidikan sampai tingkat menengah baik SLTA umum maupun kejuruan. Pada kondisi tahun 2014, komposisi angkatan kerja yang berpendidikan SLTA mencapai 36,30 persen yang terdiri dari SLTA umum sebesar 16,27 persen dan kejuruan 20,03 persen. Sementara, komposisi angkatan kerja yang berpendidikan SLTP dan Diploma/Universitas masing-masing mencapai 17,54 persen dan 16,57 persen. Disisi lain, masih terdapat komposisi angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah dalam jumlah yang cukup besar

yakni mencapai 29,59 persen. Perkembangan struktur angkatan kerja menurut pendidikan dalam beberapa periode terakhir menunjukkan pola yang cukup dinamis. Komposisi angkatan kerja yang berpendidikan SD ke bawah cenderung berkurang, sementara yang berpendidikan SLTP relatif stabil dan yang berpendidikan SLTA ke atas cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Secara kasar, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas angkatan kerja dari sisi pendidikan (BPS DIY, 2014).

Dari tabel 4.2 diatas juga dapat dijelaskan bahwa komposisi penduduk bekerja di DIY secara umum juga memiliki pola yang sama dengan komposisi angkatan kerja. Mayoritas penduduk yang bekerja telah menamatkan pendidikan pada jenjang SLTA, namun masih cukup banyak pekerja yang berpendidikan SD ke bawah. Pola perkembangan komposisi jumlah pekerja yang berpendidikan SLTA ke atas dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan, sementara yang berpendidikan SD ke bawah cenderung menurun.

Persoalan ketenagakerjaan yang cukup serius adalah semakin meningkatnya komposisi penganggur atau pencari kerja yang berpendidikan tinggi atau penganggur terdidik. Berdasarkan hasil Sakernas, komposisi jumlah penganggur pada tahun 2014 didominasi oleh mereka yang berpendidikan SLTA sederajat dengan jumlah mencapai 55,28 persen. Sementara, jumlah penganggur yang berpendidikan Diploma/Universitas tercatat sebanyak 26,17 persen dan sisanya adalah penganggur yang berpendidikan SLTP ke bawah dengan jumlah 18,55 persen.

Fenomena tersebut berkaitan dengan persoalan pertumbuhan jumlah angkatan kerja baru yang berpendidikan tinggi melebihi pertumbuhan kesempatan kerja yang tercipta serta persoalan friksional dimana angkatan kerja baru yang berpendidikan tinggi cenderung lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikannya.



Sumber: Sakernas, BPS DIY

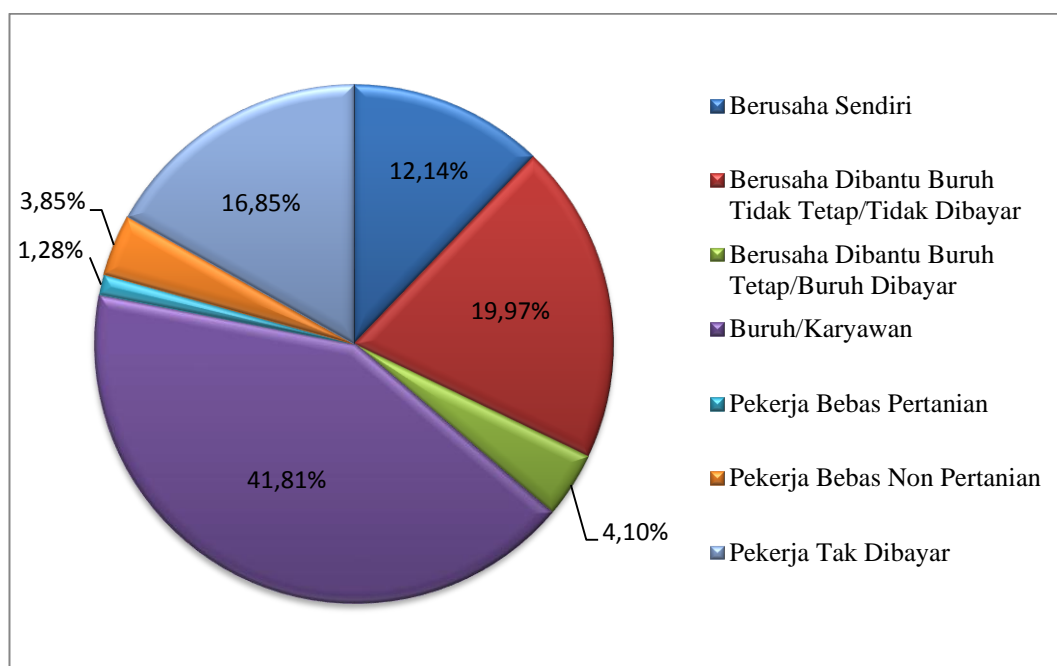
Gambar 4.2.

Komposisi Penduduk Bekerja di DIY menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 (Persen)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pasar tenaga kerja di DIY didominasi oleh empat lapangan usaha, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertanian; sektor jasa-jasa; dan sektor industri pengolahan. Sektor pertanian yang pada awalnya paling dominan dalam menyerap angkatan kerja secara berangsur-angsur perannya mulai tergantikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mampu menyerap angkatan kerja sebesar 26,64 persen di tahun 2014. Meskipun peranannya semakin menurun, sektor pertanian masih

menjadi andalan utama untuk menyerap angkatan kerja terutama di daerah perdesaan pada tahun 2014 mampu menyerap angkatan kerja sebesar 25,42 persen. Sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan masing-masing menyerap angkatan 20,75 persen dan 14,91 persen (BPS, 2014).

Kedua sektor ini mengalami peningkatan peranan yang cukup signifikan dalam menyerap angkatan kerja. Keempat sektor yang lainnya (pertambangan, listrik, gas dan air bersih; konstruksi; angkutan dan komunikasi; dan keuangan) memiliki peranan yang relatif rendah, tetapi perkembangan andilnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun (BPS, 2014).



Sumber: Sakernas, BPS DIY

Gambar 4.3.

Komposisi Penduduk Bekerja di DIY menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2014 (Persen)

Berdasarkan status dalam pekerjaan utama, mayoritas penduduk bekerja di DIY melakukan kegiatan kerja sebagai buruh/karyawan. Pada tahun 2014,

komposisi pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan mencapai 41,81 persen dan selama beberapa tahun terakhir proporsinya cenderung meningkat. Proporsi pekerja yang statusnya berusaha mencapai 36,21 persen, terdiri dari berusaha sendiri (12,14 %), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (19,97 %) dan berusaha dibantu buruh tetap (4,1 %).

Perkembangan proporsi pekerja yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang semakin menurun. Proporsi penduduk bekerja yang berstatus sebagai pekerja bebas/lepas di sektor pertanian selama lima tahun terakhir semakin menurun hingga menjadi 1,28 persen, sementara proporsi pekerja bebas non pertanian juga menurun hingga sebesar 3,85 persen (BPS, 2014).

Secara kasar, penurunan proporsi pekerja bebas di sektor pertanian menggambarkan kondisi sektor pertanian yang semakin jenuh untuk menampung kelebihan angkatan kerja karena lambatnya peningkatan produktivitas dan penyempitan lahan pertanian. Akibatnya, terjadi perpindahan status dari pekerja bebas di sektor pertanian menjadi pekerja lepas di sektor lainnya atau berubah menjadi pekerja tetap/buruh/pegawai atau pekerja tak dibayar (BPS, 2014).

2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. Dalam Penelitian ini, PDRB disajikan menurut harga konstan 2000.

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah (BPS DIY, 2015).

Salah satu indikator dalam kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang dihasilkan pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk domestik regional bruto atau pendapatan daerah. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output. Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, perekonomian D.I.Yogyakarta tahun 2014 tumbuh sebesar 5,18%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,40% (BPS DIY, 2014).

Tabel 4.3.

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2009-2014
(Juta Rupiah)**

Tahun	Kabupaten/Kota					
	Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
2007	1.587.630	3.448.949	2.941.288	5.553.580	4.776.401	18.307.848
2008	1.662.370	3.618.060	3.070.298	5.838.246	5.021.149	19.210.123
2009	1.728.304	3.779.948	3.199.316	6.099.557	5.244.851	20.051.976

Lanjutan Tabel 4.3

Tahun	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
2010	1.781.227	3.967.928	3.330.080	6.373.200	5.505.942	20.958.377
2011	1.869.338	4.177.201	3.474.288	6.704.100	5.816.568	22.041.495
2012	1.963.028	4.400.313	3.642.562	7.069.229	6.151.679	23.226.811
2013	2.062.182	4.645.476	3.825.350	7.471.898	6.498.900	24.503.806
2014	2.152.377	4.884.897	3.999.012	7.876.347	6.843.306	25.755.939

Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan nilai nominal PDRB antar waktu dan antar daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman menghasilkan PDRB terbesar secara relatif, sedangkan Kabupaten Kulonprogo merupakan Kabupaten dengan nilai PDRB terkecil. Pada tahun 2014, kontribusi Sleman terhadap total PDRB provinsi mencapai Rp.7.876.347 atau sebesar 33,17%, kemudian diikuti Kota Yogyakarta sebesar Rp.6.843.306 atau 26,41%, Kabupaten Bantul sebesar Rp.4.884.897 atau 19,23%, Kabupaten Gunungkidul Rp.3.999.012 atau 13,60% dan Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp.2.152.377 atau 7,59%.

Tabel 4.4.
PDRB menurut Lapangan Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012-2014 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	7.500	7.670	7.506
2.	Pertambangan dan penggalan	443	461	470
3.	Industri Pengolahan	9.435	10.084	10.469
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	110	117	120
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	78	79	82
6.	Konstruksi	6.772	7.106	7.508
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.878	6.187	6.540

Lanjutan Tabel 4.4

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014
8.	Transportasi dan Pergudangan	3.975	4.217	4.377
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.480	6.942	7.414
10.	Informasi dan Komunikasi	7.503	7.969	8.458
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.341	2.620	2.855
12.	Real Estate	5.116	5.322	5.735
13.	Jasa Perusahaan	831	858	924
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.373	5.639	5.971
15.	Jasa Pendidikan	6.148	6.430	6.938
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.791	1.916	2.062
17.	Jasa Lainnya	1.919	2.012	2.119
Total PDRB		71.702	75.637	79.557

Sumber: BPS DIY, 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 tumbuh mengesankan karena hampir seluruh sektor tumbuh positif. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 8,97 persen, disusul sektor Jasa Pendidikan, Real Estate, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Perusahaan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Jasa lainnya, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas serta Sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu 7,91 persen sampai dengan 2,11 persen. Sedangkan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh negatif 2,13 persen (BPS DIY, 2015).

Tabel 4.5.
Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Item	Nilai (Ribu Rp)	Persen (%)
A. Pendapata Asli Daerah (PAD)	1.233.738,5	39,80
1. Pajak Daerah	1.098.908,5	35,45
2. Retribusi Daerah	36.670,3	1,18
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.505,5	1,47
4. Lain-lain PAD yang sah	52.654,1	1,70
B. Dana Perimbangan	1.038.621,0	33,50
1. Dana Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	101.565,8	3,28
2. Dana Alokasi Umum	899.923,5	29,03
3. Dana Alokasi Khusus	37.131,6	1,20
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	827.838,0	26,70
Jumlah Pendapatan	3.100.197,4	100

Sumber: BPS DIY, 2015

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan data RAPBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014, rencana penerimaan daerah tercatat sebesar Rp 3.10 triliun. Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 39,80 persen, dari Dana Perimbangan sebesar 33,50 persen, serta dari penerimaan lainnya yang sah sebesar 26,70 persen (BPS DIY, 2015).

3. Perkembangan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Investasi adalah pengorbanan materi maupun non materi pada masa sekarang untuk memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Menurut pelakunya investasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerintah, perusahaan (terdiri dari perusahaan yang difasilitasi dan tidak difasilitasi), serta rumah tangga. Data investasi perusahaan yang tersedia dan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan adalah rencana dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang merupakan kelompok

investasi yang difasilitasi yang dilaporkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Dalam penelitian ini data investasi menggunakan data penanaman modal dalam negeri (PMDN) (BPS DIY, 2014).

Tabel 4.6.
Kumulatif Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 2007-2014 (Juta Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota					
	Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
2007	28.559,3	86.951,6	19.586,2	921.970	744.466,2	1.801.533,83
2008	28.559,3	86.951,6	19.586,2	926.863	744.466,2	1.806.426,44
2009	28.559,3	96.951,6	29.074,3	983.463	744.466,2	1.882.514,54
2010	756.176,2	96.2340	96.951,5	34.017,5	35.440,1	1.884.925,86
2011	34.017,5	189.256	35.502,5	1.218.958	835.409,5	2.313.143,74
2012	34.017,5	191.257	35.502,5	1.242.033	1.303.134,1	2.805.944,61
2013	34.017,5	241.023	35.502,5	1.242.243	1.311.867,8	2.864.654,49
2014	378.473,8	253.292	35.502,5	1.349.718	1.551.559,2	3.568.546,29

Sumber: BPS DIY, 2007-2014

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di bidang investasi, realisasi kumulatif nilai penanaman modal dalam negeri menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta bersifat fluktuatif yaitu terjadi peningkatan, penurunan dan stagnan atau tetap di beberapa tahun beruntun yaitu seperti yang terjadi di Kulonprogo pada tahun 2007-2009 sebesar 28559,36 juta rupiah serta di beberapa kabupaten/kota lainnya juga mengalami kondisi yang sama. Sampai dengan tahun 2014 realisasi kumulatif nilai penanaman modal dalam negeri yang masuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 3,57 triliun dari rencana investasi sebesar Rp. 4,72 triliun atau 75,64 persen dari rencana yang ditetapkan.

Investasi dalam negeri yang masuk ditanam tahun 2014 di sektor tersier (hotel dan restoran, jasa lainnya, dan pengangkutan) sekitar 56,60 persen, di sektor sekunder (industri) 38,36 persen dan sektor primer (pertanian dan pertambangan) hanya 5,03 Persen (BPS DIY, 2015).

Tabel 4.7.
Kumulatif Penanaman Modal Dalam Negeri Realisasi menurut Sektor di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2014 (Rupiah)

Sektor	2012	2013	2014
Primer	27.572.514.000	27.572.514.000	27.572.514.000
Sekunder	1.115.645.215.834	1.165.411.322.834	1.552.938.922.852
Tersier	1.662.726.876.096	1.671.670.654.921	1.988.034.854.903
Total	2.805.944.605.930	2.864.654.491.755	3.568.546.291.755

Sumber: BPS DIY, 2012-2014

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di bidang investasi realisasi kumulatif nilai penanaman modal dalam negeri yang terrealisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 pada sektor primer cenderung stagnan/tetap sebesar 27.572.514.000 rupiah. Pada sektor sekunder PMDN yang terealisasi mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dari ketiga sektor tersebut sektor yang paling besar nilainya yaitu sektor tersier pada tahun 2013 sebesar 1.671.670.654.921 rupiah, dengan penyumbang terbanyak yaitu pada hotel dan restoran sebesar 1.191.571.540.000 rupiah (BPS DIY, 2012-2014).

4. Perkembangan Upah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Upah dalam penelitian ini mengambil data dari Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP merupakan standar upah minimal yang harus dibayarkan oleh

pengusaha/perusahaan kepada karyawan/buruh/pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup minimum yang layak (KHL) yang berlaku di provinsi yang bersangkutan. Tujuan utama penetapan upah minimum adalah untuk menjaga daya beli penduduk akibat adanya kenaikan harga atau inflasi. Penentuan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari perwakilan birokrat, akademisi dan serikat pekerja melalui survei kebutuhan hidup minimum yang dilakukan setiap tahun (BPS DIY, 2014).

**Tabel 4.8. Upah Minimum Provinsi (UMP)
2007-2014
(Ribu Rupiah)**

Tahun	Kabupaten/Kota					
	Kulon progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
2007	500	500	500	500	500	500
2008	586	586	586	586	586	586
2009	700	700	700	700	700	700
2010	745,7	745,7	745,7	745,7	745,7	745,7
2011	808	808	808	808	808	808
2012	892,7	892,7	892,7	892,7	892,7	892,7
2013	947,1	947,1	947,1	947,1	947,1	947,1
2014	988,5	988,5	988,5	988,5	988,5	988,5

Sumber: BPS DIY, 2007-2014

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2007 hingga 2014 cenderung terjadi kenaikan upah setiap tahunnya hal ini wajar dikarenakan perubahan berbagai harga konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka upah juga akan mengalami kenaikan untuk dapat memenuhi standar kebutuhan hidup layak.